

## Pengantar Penerbit

Perubahan yang berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam yang diakibatkan oleh bencana alam Tsunami pada saat ini, bukanlah peristiwa yang diharapkan oleh setiap umat manusia dimanapun berada. Seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik, rasa aman masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat mengalami kehancuran. Proses-proses perbaikan sarana dan prasarana publik tersebut yang lebih banyak menjadi agenda utama pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional, tidak diikuti dengan proses penyadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam menentukan kembali proses perbaikan sarana dan prasarana publik mereka. Perbaikan pelayanan publik, peningkatan rasa aman dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru seharusnya juga menjadi agenda masyarakat Aceh yang dibantu pendanaannya oleh pemerintah pusat.

Kerusakan dan kerugian yang dialami tidak pelak menggugah perasaan dan dorongan untuk melakukan sesuatu dengan bayangan dapat membantu meringankan beban mereka yang menjadi korban bencana alam Tsunami di NAD. Namun, sudahkah kita menyadari bahwa beban yang hendak diringankan, upaya bantuan yang hendak diberikan telah di konsultasikan pengadaannya dengan melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang menjadi korban yang lebih paham kebutuhan yang amat dirasakan oleh mereka, terutama anak-anak dan kaum perempuan?

Upaya membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam sebetulnya sudah diupayakan, bahkan, sejak daerah itu masih dibawah kondisi Daerah Operasi Militer. Beberapa inisiatif dilakukan guna memikirkan dan menyiapkan warga untuk melakukan upaya membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam selepas daerah itu dari kondisi Operasi Militer.

Pada masa Darurat Militer dan kemudian Darurat Sipil, pemikiran akan inisiatif-inisiatif melakukan pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam juga dilakukan. Salah satu diantaranya adalah inisiatif yang mengupayakan munculnya pemikiran bersama dengan melibatkan wakil-wakil dari 20 kabupaten yang ada di NAD. Para pihak yang dilibatkan adalah mereka yang mewakili kelompok akar rumput seperti petani dan nelayan, juga ulama hingga wakil eksekutif serta legislatif. Dan, 30 % diantaranya adalah kaum perempuan.

Bencana yang secara luar biasa membuat seluruh dunia tersentak ini, sudah seyogyanya juga melibatkan kaum perempuan untuk menata kembali hidup mereka. Saat ini, sudah tercatat sebanyak 400.000 ribu orang yang menjadi pengungsi di NAD. 25% diantaranya adalah orang dewasa, berarti 75% sisanya adalah anak-anak dan orang tua. Namun, belum ada data yang dapat menunjukkan berapa banyak sebetulnya jumlah pengungsi laki-laki dan perempuan?

Di atas semua itu, hal yang diperlukan saat ini adalah pemikiran bersama mengenai strategi guna melakukan rekonstruksi sosial di NAD. Siapa sajakah yang akan dilibatkan dalam membangun kembali NAD? Kepentingan dan kebutuhan siapakah yang terwakili dalam upaya tersebut? Bagaimana dengan kebutuhan serta kepentingan kaum perempuan dan anak-anak? Apakah mereka sudah terwakili dalam upaya itu?

Buku "Identitas Politik Perempuan Aceh", sebuah buku yang ditulis pada tahun 2000 untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S2 dari Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda masih amat relevan bagi kita semua. Terutama, guna memahami posisi dan kondisi perempuan Aceh agar dapat melibatkan mereka dalam proses Rekonstruksi Sosial Aceh. Secara jujur dan kritis buku ini membawa kita pada titik mengajak kita semua menjalin kerja untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi perempuan Aceh. Dan, itu artinya bagi tatanan kehidupan mendatang yang lebih baik di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

Banyak pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, untuk itu kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasinya, juga kepada Ford Foundation dan Hivos.

Jakarta, Februari 2005  
Women Research Institute